

PROPOSAL

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI LUAS



PENULIS:

Nama : Sri Sugiarti, S.E, M.M (0326106501)

Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Pasar Minggu Jakarta

PROGRAM STUDI MANAJEMEN STRATA SATU

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

2020

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dimana informasi tidak dapat dibendung lagi maka Indonesia juga mengalami dampaknya antara lain, makin kompleknya tuntutan masyarakat dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan publik. Untuk menghadapi kompleksitas tersebut maka diperlukan penataan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah . Pada pmerintah daerah dikeluarkan UU No: 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menata pemerintahanya atau diberikan otonomi luas. Dalam menjalankan organisasi pemerintahan ini diperlukan sumber daya manusia (pegawai) yang berkualitas, ini menjadi tugas pokok unit personalia untuk meningkatkan kualitas pegawai. Unit personalia harus melakukan pengembangan sumber daya manusia, karena jumlah sumber daya sudah cukup tinggal meningkatkan dengan cara peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, sikap dan tingkah laku baik secara individual maupun team. Sedangkan dari pihak pimpinan atau pejabat pemerintah harus mampu memainkan peran aktif dalam menciptakan perubahan yang positif dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Perubahan positif itu adalah perubahan dari konsep manajemen sumber daya manusia tradisional yang tidak kondusif lagi ke konsep good governance yang mengedepankan ekonomis, efektif, efisiensi dan akuntabel. Dengan adanya perubahan ini pemerintah daerah dapat menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan publik dengan profesionalitas yang tinggi sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut merasa puas akan pelayanan tersebut.

Kata Kunci : Sumber daya manusia, good governance, pelayanan publik

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN MAKING GOOD GOVERNANCE IN THE AUTONOMY BROAD ERA

By Sri Sugiarti

Abstract

In this era of globalization where information can not be dammed again, Indonesia is also experiencing its effects, among others, the more complex the demands of society in performing the public service pokonya. To deal with this complexity will require structuring both the central and regional levels. At the local government issued Law No: 22 of 1999 on regional autonomy, which the local government is given broad authority to restructure government or granted extensive autonomy. In carrying out this governmental organizations is needed human resources (employees) quality, a fundamental duty personnel to improve the quality of the unit employees. Unit personnel should conduct human resource development, as the number of resources is enough living increases by increasing the knowledge, skills, abilities, attitudes and behavior of both individual and team. While party leaders or government officials should be able to play an active role in creating positive change in the organization of government. Positive change is a change from the concept of traditional human resource management are not conducive more to the concept of good governance that promote economical, effective, efficient and accountable. With the change of the local government can run the main task, namely public service with high professionalism that the public as users of these services are satisfied with the service.

Keyword : Human resources development, good governance

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah berakhirnya “ORDE BARU” kemudian memasuki “ERA REFORMASI” , terjadilah perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia terutama pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pula sebagai refleksi dari penerapan otonomi daerah yang dinyatakan dalam UU NO: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU NO: 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah di segala tingkat baik pusat, propinsi, kabupaten maupun kota dihadapkan pada persoalan yang dilematis dalam menjalankan tugas pokok yang semakin kompleks, akibat dari semakin kompleksnya tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik pada saat ini yaitu era globalisasi.

Era globalisasi yang mencirikan kemampuan untuk mengedepankan *comperative* dan *competative* kemudian disertai era reformasi yang mengedepankan transparasi, demokrasi dan akuntabilitas, hal ini telah memposisikan pemerintah pada kebutuhan untuk melakukan “outsourcing” dari luar pemerintah baik masyarakat ataupun dunia swasta untuk menghadapi seluruh kompleksitas diatas. Dari kebutuhan tersebut muncul suatu kondisi untuk melibatkan *stake-holders* yang makin meluas baik unsur masyarakat maupun swasta untuk bersama-sama menangani “*publik affairs*” yang tidak efektif dan efisien lagi dilakukan oleh pemerintah sendirian untuk menangani masalah kompleksitas dan dalam pengelolaan sektor publik yang dahulu merupakan monopoli dari pemerintah semata.

Otonomi daerah sudah berjalan kurang lebih 12 tahun sejak diberlakukannya pada tahun 1999 sampai sekarang. Persoalan yang muncul adalah

1. Sejauhmana pemerintah daerah mempunyai sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mampu menjawab tantangan otonomi luas yang mengedepankan transparansi, demokrasi dan akuntabilitas.
2. Sejauhmana memberikan kepuasan pelayanan masyarakat setelah berlakunya UU NO:22 dan UU NO: 25 tahun 1999.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Dengan diundangkannya UU NO: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini sebagai konsekwensi logis adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah. Secara teoritis ada enam elemen utama yang membentuk pemerintah daerah yaitu:

1. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan umum (publik services) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Keenam elemen diatas secara integrated merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintah daerah, untuk itu maka penataan pemerintah daerah akan selalu berkaitan dengan penataan keenam elemen tersebut diatas. Penataan haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh untuk menghasilkan outcomes yang optimal. Undang-undang NO: 22 tahun 1999 ini juga penyebab terjadinya berbagai perubahan fundamental terhadap elemen-elemen pemerintah daerah tersebut diatas. Untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap reformasi, maka diperlakukan berbagai pemikiran secara sistimatis untuk dituangkan dalam agenda penataan pemerintah daerah.

Dalam agenda penataan pemerintahan daerah dengan mengacu kepada tatanan normatif sebagai aturan-aturan baru yang ditetapkan dalam UU NO:22 tahun 1999 dan tatanan teoritis sebagai justifikasi akademisnya. Agenda-agenda tersebut mempunyai

tujuan utama dari penataan adalah bagaimana dengan penataan kewenangan (urusan otonomi), kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen. Otonomi daerah akan dapat memberdayakan pemerintah daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan alur pikir akademis yang berkembang secara universal bahwa pemerintah daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu:

1. Tujuan Politis.

Akan memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat serta menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan, persatuan, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Administratif

Mengisyaratkan Pemda untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dari kombinasi kedua tujuan Pemda yaitu politis dan administratif akan melahirkan suatu gagasan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemda harus mampu bertindak ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Secara operasional terkandung dalam pengertian konsep tersebut yaitu:

1. Dalam pengertian ekonomis terkandung makna, bagaiman Pemda mampu menjalankan urusan otonominya dengan berbagai pertimbangan ekonomis yaitu memilih dari berbagai alternatif yang terbaik dari sudut pembiayaan. Tujuan ekonomis ini akan memberikan citra hilangnya kesan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan dari setiap urusan. Pemda akan selalu bersikap kompetitif dalam upaya memberikan nilai tertinggi bagi setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan.
2. Dalam pengertian efektif terkandung makna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemda dapat mencapai sasaran yang direncanakan, untuk itu perlu disepakati terlebih dahulu standar efektifitas yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam konteks efektif adalah bahwa Pemda menjadi peka dalam menentukan tujuan atau sasaran dari setiap urusan otonomi yang dilaksanakan. Adanya sasaran yang jelas, akan menunjukkan sejauh mana Pemda dapat menangkap aspirasi dan mengartikulasikan tuntutan (demand) dan dukungan (suports) masyarakat yang bersangkutan.

3. Dalam pengertian efisien terkandung makna bahwa output yang dihasilkan dari setiap penyelenggaraan urusan otonomi tercapai dengan resources input yang minimal. Tujuan yang ingin dicapai untuk menciprakan citra bahwa Pemda akan selalu hemat dalam menggunakan resources baik yang berupa pegawai, uang perlatan dan tata kerja (prosedur) dalam menjalankan tugas pokoknya.
4. Dalam pengertian akuntabel terkandung makna bahwa Pemda mengutamakan kepentingan warganya dengan jalan mempertanggung jawabkan pelaksanaan otonominya kepada masyarakat melalui wakil-wakil rakyat dalam yuridiksi-nya. Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui pendidikan politik masyarakat lokal yang akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional. Adanya pendidikan politik yang baik akan mencegah gerakan separatisme karena perbedaan etnis, agama, suku, bahasa maupun tingkat ekonomi.

Pemerintah daerah secara filosofi adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (publik services), ini berarti keberadaan Pemda adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan keunikan baik dari aspek penduduk maupun karakter geografis yang dimiliki daerah tersebut. Masyarakat pantai dengan mata pencarian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhan dengan masyarakat perkotaan. Sangat tidak logis kalau di kota masih dijumpai urusan-urusan pertanian atau perternakan. Untuk itu analisa kebutuhan merupakan suatu keharusan sebelum urusan tersebut di serahkan ke suatu daerah otonomi. Dengan diundangkannya UU No: 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka diperlukan adanya penataan kembali mengenai aspek kewenangan, aspek kelembagaan, aspek personil, keuangan, perwakilan dan manajemen dari pemerintah daerah yang ada sekarang dengan mengacu kepada tatanan normatif sesuai dengan aturan-aturan yang baru tersebut (UU No:22 tahun 1999) dan tatanan teoritis sebagai justifikasi akademisnya.

Oleh sebab itu upaya yang harus dilakukan untuk mereaktualisasikan otonomi daerah dengan beberapa langkah:

1. Berilah daerah dalam urusan otonomi sesuai dengan kebutuhan. Urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan karakter geografis dan mata pencarian utama penduduknya.

2. Bagaimana melembagakan urusan-urusan dalam otonomi daerah. Lembaga ini akan mewadai urusan-urusan tersebut yang pada gilirannya akan melahirkan struktur organisasi dan tata kerjanya. Berbagai alternatif dapat ditawarkan dalam aspek kelembagaan tersebut, apakah akan memilih kelembagaan publik dalam bentuk pembentukan dinas-dinas otonomi atau menyerahkan urusan tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak swasta ataupun kemitra antara Pemda dengan swasta.
3. Penataan sumber daya manusia, yaitu adanya pegawai yang menjalankan kelembagaan tersebut. Kelemahan dari sistem kepegawaian Pemda selama ini tidak kondusif untuk mencetak personil yang handal dan profesional yang mampu melahirkan gagasan-gagasan dengan keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai dengan tuntutan globalisasi.

Dalam menerapkan UU NO: 22 tahun 1999 maka diperlukan adanya penataan kembali mengenai aspek urusan atau kewenangan, aspek kelembagaan, aspek personil, aspek keuangan, aspek perwakilan dan manajemen dari pemerintah daerah. Adapun bentuk penataan yang akan dilakukan haruslah mengacu pada penataan tersebut hendaknya kondusif untuk membentuk pemerintah daerah yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel. Untuk lebih jelasnya penataan kembali mengenai aspek tersebut diatas adalah:

1. Aspek Keuangan ; argumen utama adalah Pemda dalam menjalankan otonomi hendaknya didukung oleh adanya sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai otonominya. Kurangnya sumber keuangan akan menyebabkan mengurani standar pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
2. Aspek perwakilan; keberadaan DPRD haruslah mampu menciptakan check and balance terhadap esekutif daerah untuk menciptakan pemerintaan daerah yang kompetitif dan inovatif serta bersih dari unsur KKN. Dengan UU NO: 22 tahun 1999 telah memberikan peranan sentral kepada DPRD dalam menentukan jalannya pemerintah daerah ditandai dengan besarnya kewenangan DPRD dalam memilih dan menetapkan kepala daerah dan bahkan UU tersebut telah memposisikan kepala daerah untuk bertanggung jawab kepada DPRD. Apabila pertanggungjawaban kepala daerah tidak memuaskan, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah tersebut.
3. Aspek manajemen; berbagai paradigma baru pengelolaan sektor publik telah muncul dan telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Pada dasarnya sektor publik termasuk pemerintah daerah telah dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, ekonomis

dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Pendekatan manajemen modern perlu dicermati seperti privatisasi, kemitraan, dan beralihnya peran pemerintah dari penyedia menjadi pengarah dan pemberdaya.

B. UNGENSI GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam perkembangan terakhir terdapat pendekatan governance dalam pengelolaan urusan publik yang tadinya menjadi domain pemerintah (monopoli pemerintah) menjadi kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama secara sinergi menyediakan pelayanan publik yang saling mendukung dan menguntungkan, inilah konsep governance. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan mendesaknya kebutuhan untuk menerapkan konsep governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. Peranan Monopolistik Pemerintah

Selama ini pemerintah memainkan peranan yang dominan dan monopolistik dalam mengaturnasyarakat, termasuk mengatur sumber daya alam, kehidupan sosial dan ekonomi melalui instrumnt baik yang bersifat biasa ataupun bersifat memaksa. Sedangkan sektor swasta tidak mempunyai wewenang dalam proses pemerintahan tersebut dan masyarakat tidak banyak membantu ikut berperan. Inilah gambaran umum pemerintahan di berbagai negara.

2. Pengaruh Globalisasi

Pendekatan tradisional dalam penyelenggaran pemerintah telah menjadi tidak populer, dengan terjadinya perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, komunikasi, lingkungan dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut sudah bersifat global dan melewati batas-batas suatu negara sehingga timbullah globalisasi yang didasari oleh sistem pasar global dalam pengelolaan perekonomian kemudian menciptakan interaksi masyarakat secara global berdampak dapat merugikan suatu negara terutama aspek kedaulatan dan hak mereka dalam menerapkan demokrasi. Dan perubahan ini telah membawa manusia ke dalam era baru pada masyarakat dan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat dituntut untuk mengkaji ulang pendekatan tradisional dalam penyelenggaraan pemerintah.

3. Pengaruh Privatisasi

Privatisasi sebagai tantangan utama dalam memenangkan globalisasi telah menyebabkan perubahan hubungan negara dengan masyarakat, hubungan pemerintah dengan swasta, dan hubungan internasional yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan.

4. Perubahan Tehnologi.

Aplikasi komputer dan internet dalam dunia komunikasi telah mempengaruhi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka dalam proses pemerintah secara lebih meluas. Pemerintah tidak dapat lagi mengontrol aliran informasi yang telah melewati batas-batas negara seperti E-mail telah menyebabkan orang dapat berkomunikasi seketika dengan orang di seluruh dunia tanpa hambatan. Tele-conference, cyberspace dan satelit telah memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk mempelajari tentang masyarakat negara lain serta sistim politiknya, kebijakan publik dan lainnya dalam hal yang berhubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

5. Tuntutan Partisipasi Masyarakat

Adanya aliran informasi global tersebut telah menyebabkan tuntutan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam proses pemerintahan. Telah bermunculan institusi yang ingin ikut juga dalam proses pemerintah yang selama ini menjadi monopoli lembaga-lembaga pemerintah. Proses partisipasi dalam pemerintahan merupakan elemen esensial untuk civilisasi manusia di masa depan.

6. Gejala Urbanisasi

Terjadinya urbanisasi secara pesat dengan berbagai problematikanya maka akan terjadi konsentrasi penduduk yang tinggi di perkotaan. Sehingga berbagai masalah akan muncul seperti kurangnya infrastruktur, masalah persampahan, kesehatan, sanitasi lingkungan, kemiskinan, polusi dan kriminal. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, tidak akan mampu ditangani pemerintah saja tapi memerlukan partisipasi swasta dan masyarakat.

7. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Terjadinya berbagai kerusakan lingkungan baik udara, air, tanah, dan hujan asam yang telah menimbulkan adanya kebutuhan green agenda secara global. Persoalan kerusakan lingkungan tersebut tidak akan mungkin hanya ditangani oleh

pemerintah saja tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan publik di bidang lingkungan.

8. Mewabahnya Kultur Individualisme dan Konsumerisme

Terjadinya penetrasian gaya hidup dunia barat di dunia timur melalui medium globalisasi, akibatnya adalah terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan dan kehidupan sosial untuk memenuhi tuntutan gaya hidup dari pasar global. Kondisi tersebut menyebabkan polusi, komersialisasi, kesenjangan yang melebar antara kaya dan miskin, dan pemakaian buruh anak-anak. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan sinergi upaya antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

9. Kesadaran Gender dan, Rasial

Telah muncul kesadaran kaum wanita untuk ikut aktif dalam proses pemerintahan. Konflik masalah kesukuan menjadi sering terjadi seiring dengan makin sadarnya mereka akan hak-haknya.

Dari alasan-alasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pola pemerintahan yang tradisional telah tidak mampu lagi untuk menciptakan partisipasi masyarakat secara suka rela, baik dalam isu sosial maupun politik. Oleh sebab itu sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk merubah konsep pemerintahan dari pola tradisional menuju konsep kepemerintahan yang bersifat partisipatif yang melibatkan semua stake holders dalam semua level pemerintahan. Konsep kepemerintahan yang perlu dikembangkan menjadi konsep yang lebih demokratik, menjadi lebih luas partisipasinya yang menjurus kepada konsep governance. Kompetensi pemerintah sebagai leading partner dalam proses menuju konsep governance mengharuskan pemerintah untuk mengakomodasikan dan memfasilitasi keterlibatan pihak masyarakat dan swasta dalam kelesuruhan proses governance tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah melalui prosedur yang sistematis. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi, sedangkan metodologi penelitian merupakan suatu kajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam riset dimana terdapat langkah-langkah sistematis yang dilakukan demi mengkaji dan mencari jawaban dari suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif karena penulis akan melakukan proses analisis berupa pemaknaan dan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan memberikan informasi begitu detail dengan penjelasan atau gambaran tentang ruang lingkup yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang erat hubungannya dengan topik yang dibahas. Untuk melengkapi data primer dan data sekunder yang diperlukan adalah:

1. Pengumpulan data kepustakaan yaitu melalui dari literatur, koran, dan media lainnya.
2. Pengumpulan data lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung melalui kegiatan:
 1. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden.
 2. Pengamatan yaitu dengan mencatat data-data dan informasi yang diperoleh dengan cara pengamatan lapangan.

Pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan pengamatan dan pencatatan secara langsung dari sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian seperti kepustakaan dan browsing internet (data sekunder), sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif maka data yang dikumpulkan menghasilkan penelitian deskriptif yaitu berupa kata-kata dan gambaran bukan angka-angka.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Biaya Penelitian Dosen

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang dianggarkan (RP)
1.	Honor peneliti (maks 30%)	Rp 1.200.000
2.	Sewa peralatan (maks 40%)	Rp 800.000
3.	Bahan habis pakai (maks 60%)	Rp 1.000.000
Total		Rp 3.000.000

B. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persiapan pengumpulan data	■	■						
2.	Pengolahan data		■	■	■				
3.	Pengumpulan bahan penelitian			■	■	■			
4.	Persiapan pembuatan laporan penelitian					■	■		
5.	Menyusun penelitian						■	■	■
6.	Penyerahan laporan penelitian								■

Daftar Pustaka

- Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004
- HAW. Wijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, PT.Raja
- Muhmidayeli, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Paskah Sarjana Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Empat, Tahun 2007.UIN Suska Riau dan LSFK2P Pekanbaru,2007
- Sedarmayanti, 2013, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka otonomi Daerah, P.T Mandar Maju, Bandung
- Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara Jakarta Edisi I Cetakan 11, Tahun 2004.
- Suryadi, 2009, pengembangan Kinerja pelayanan Publik, P.T. Refika Aditama, Bandung
- Trito PB, Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Partnerhip dan Kolektivitas, Tugu Publisher, Yogyakarta,2007